**PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :**

**GITA ADELINA SIMAMORA**

**(2416041088)**

****

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

 **UNIVERSITAS LAMPUNG**

 **BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
| Farida Rahmawati(2021) | *Implementasi Program Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah belum berjalan maksimal karena keterbatasan sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan adanya ketergantungan pada kepala pekon. Produk yang dihasilkan kurang inovatif serta dukungan pemerintah maupun pentahelix masih terbatas. |
| Irma Suryani (2023) | *Pengaruh Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor (Perwali No. 61 Tahun 2018)* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan dengan kontribusi sebesar 40%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian merekomendasikan adanya kampanye jangka panjang serta program daur ulang agar kebijakan berjalan efektif. |
| John L. Tampubolon | *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana-prasarana, serta sumber daya manusia. Penelitian menyarankan peningkatan sosialisasi, penambahan fasilitas, dan penguatan kemitraan dengan pihak swasta maupun masyarakat. |

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam isu pengelolaan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di bidang lingkungan.

Namun, penelitian ini memiliki pembaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu dengan menitikberatkan pada pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengukur hubungan secara lebih terarah dan terukur, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

**2.2 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi publik dan pembangunan, karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan kebijakan. Secara sederhana, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Nasdian (2003) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses aktif yang muncul dari kesadaran masyarakat sendiri, dipandu oleh nilai dan cara pandang mereka, serta dilaksanakan melalui mekanisme yang memungkinkan kontrol efektif atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pandangan ini mempertegas bahwa partisipasi bukanlah sesuatu yang bersifat *top-down*, melainkan *bottom-up*, karena inisiatifnya berasal dari masyarakat itu sendiri.

Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan secara fisik dalam bentuk tenaga, dana, atau materi, tetapi juga mencakup aspek mental, psikologis, dan emosional. Partisipasi tersebut terlihat dari kesediaan masyarakat untuk memberikan dukungan moral, pemikiran, kesadaran, serta rasa memiliki terhadap program atau kebijakan publik yang dilaksanakan. Dengan demikian, partisipasi menjadi indikator penting dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mencerminkan kualitas hubungan antara negara dan warganya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat memiliki makna yang luas dan mendalam. Partisipasi bukan hanya tentang “ikut serta” dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat memiliki ruang untuk berinisiatif, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan mereka. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, karena tanpa keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan yang dibuat sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

**2.3 Efektivitas**

Efektivitas merupakan konsep penting dalam administrasi publik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi, program, atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya berfokus pada keluaran (*output*), tetapi juga pada hasil (*outcome*) dan manfaat (*impact*) yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, efektivitas menggambarkan keberhasilan suatu kebijakan dalam menjawab permasalahan publik secara tepat dan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Menurut Sedarmayanti (2010), efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana target atau tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan bahwa efektivitas berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan, baik dalam organisasi maupun dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Efektivitas di sini tidak hanya diukur dari segi kuantitas output yang dihasilkan, tetapi juga kesesuaian hasil tersebut dengan target serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas menjadi indikator utama untuk menilai apakah kebijakan berjalan sesuai dengan harapan.

Lebih lanjut, menurut Handayaningrat (2011), efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu unit organisasi dalam melaksanakan seluruh tugas pokoknya sehingga menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa efektivitas mencakup keterkaitan antara input, proses, dan hasil yang diperoleh, di mana semua unsur harus berjalan seimbang agar tujuan dapat tercapai.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu organisasi maupun kebijakan publik dalam mencapai tujuan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

**2.4 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka kepentingan bersama. Kebijakan publik tidak hanya dilihat sebagai produk keputusan formal, tetapi juga sebagai suatu proses yang mencakup formulasi, implementasi, serta evaluasi.

Menurut Nugroho (2017), kebijakan publik adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik memiliki orientasi tujuan, yaitu menyelesaikan masalah yang bersifat publik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Winarno (2014) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang kehidupan masyarakat. Pandangan ini menegaskan peran pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan publik, baik dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan.

Sementara itu, menurut Subarsono (2015), kebijakan publik dapat dipahami sebagai intervensi pemerintah dalam urusan publik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan, tetapi juga tindakan nyata yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui proses yang terencana dan terukur. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, yang dirancang untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

**2.5. Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pembuangan akhir, tetapi dimulai sejak tahap pengurangan sampah di sumbernya, melalui langkah-langkah seperti pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Dengan demikian, pengelolaan sampah bersifat preventif sekaligus kuratif.

Seiring perkembangan, konsep pengelolaan sampah tidak lagi terbatas pada prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tetapi berkembang menjadi 5R, yakni *reduce, reuse, recycle, replace,* dan *replant/recovery*. Kristianto dan Rosariawari (2023) menekankan bahwa penerapan 5R berbasis masyarakat mampu mengurangi timbulan sampah rumah tangga secara signifikan, hingga mencapai 40,83% di wilayah Surabaya. Penelitian lain oleh Setyaningsih dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan strategi 5R di sektor industri dapat menekan limbah produksi sekaligus mendorong pemanfaatan kembali material yang sebelumnya terbuang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi, dimulai dari pengurangan timbulan sampah, penanganan sampah yang dihasilkan, hingga pemprosesan akhir yang ramah lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan sampah yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam menata sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

**2.6 kerangka berpikir**

Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka, rumusan, dan tujuan masalah penelitian berfungsi sebagai panduan bagi peneliti. Kerangka ini membantu memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai rencana dan hasil yang diperoleh selaras dengan tujuan yang diharapkan. Serta, memberikan alur pemikiran yang jelas dan terarah dalam mengumpulkan data.

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

**2.7 Hipotesis**

H0: Tingkat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

H1: Tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Elka Taruna Bhakti”. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Input*, 2(1).

Handayaningrat, S. (2006). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Kristianto, A., & Rosariawari, A. (2023). Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Metode 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant) Berbasis Masyarakat di Wilayah Kebraon Kota Surabaya. Envirous: Journal of Environmental Research, 2(1), 1–10.

Mulyadi. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Nasdian, F. T. (2003). *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nugroho, Riant. (2017). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rahmawati, F. (2021). *Implementasi program bank sampah dalam meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus* (Skripsi, Universitas Lampung).

Sedarmayanti. (2006). *Manajemen sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Setyaningsih, R., Sulistyaningsih, E., & Nugraha, A. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Industri Rokok Menggunakan Konsep 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair). Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(2), 210–221. <https://doi.org/10.14710/jil.21.2.210-221>

Subarsono, A.G. (2015). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryani, I. (2023). *Pengaruh persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor (Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018)* (Skripsi, Universitas Lampung).

Tampubolon, J. L., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review, 7*(2).

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.